

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah proses perubahan yang bertujuan untuk membawa masyarakat menuju kondisi yang lebih baik dan berkelanjutan demi mencapai kesejahteraan bersama. Pembangunan yang efektif harus dirancang secara tepat dan diarahkan dengan benar sehingga setiap tahapannya mendekatkan masyarakat pada tujuan yang ingin dicapai. Proses ini dilaksanakan secara terintegrasi dan berorientasi jangka panjang, disesuaikan dengan kebutuhan serta prioritas masing-masing wilayah. Pembangunan adalah proses yang mencakup berbagai dimensi, yang melibatkan penataan ulang dan pengarahannya kembali sistem sosial dan ekonomi yang dimiliki (Mongan, 2019). Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari perubahan yang terjadi pada berbagai dimensi baik ekonomi maupun sosial. Saat ini, paradigma pembangunan berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui indikator pembangunan manusia, yang merefleksikan kualitas hidup masyarakat di setiap negara.

Manusia menjadi fokus utama dalam setiap upaya keberhasilan pembangunan. Indeks pembangunan manusia adalah salah satu indikator penting untuk menilai perkembangan dan kemajuan suatu negara. Berdasarkan *United Nations Development Programme* (UNDP), kualitas sumber daya manusia di suatu negara dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang juga dikenal sebagai *Human Development Index* (HDI) (UNDP, 1990).



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kemajuan suatu negara dalam mencapai kualitas hidup yang tinggi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) pertama kali dirancang oleh Amartya Sen, seorang pemenang Nobel dari India, bersama ekonom Pakistan Mahbubul Haq, dengan dukungan Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics (Paramita, 2020).

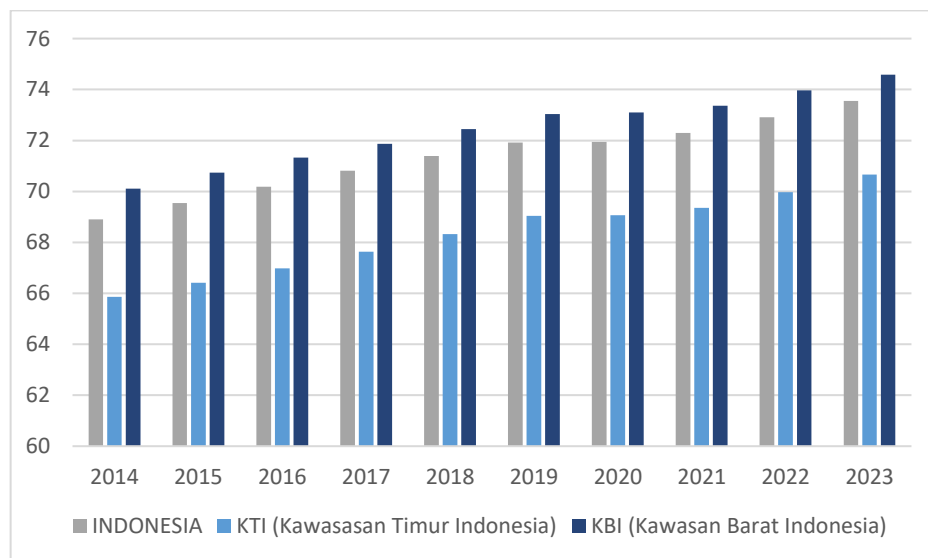
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), IPM menggabungkan tiga dimensi fundamental pembangunan manusia, mencakup aspek kesehatan yang diukur melalui angka harapan hidup saat lahir, pendidikan yang diukur melalui harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan standar hidup layak yang diukur melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia diklasifikasikan ke dalam empat tingkatan utama berdasarkan capaian nilainya. Daerah dengan nilai IPM di bawah 60 termasuk dalam kategori IPM rendah, yang mencerminkan masih terbatasnya kualitas hidup penduduk terutama dari aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Selanjutnya, wilayah dengan nilai IPM antara 60 hingga di bawah 70 dikategorikan sebagai IPM sedang, yang menunjukkan adanya perbaikan pembangunan manusia meskipun belum merata dan masih memerlukan peningkatan di berbagai sektor. Daerah yang memiliki nilai IPM antara 70 hingga di bawah 80 termasuk dalam kategori IPM tinggi, yang menandakan bahwa pembangunan manusia telah berjalan relatif baik dan didukung oleh

; pendidikan, kesehatan, serta tingkat kesejahteraan yang lebih  
adai. Sementara itu, wilayah dengan nilai IPM 80 ke atas digolongkan



sebagai IPM sangat tinggi, yang mencerminkan keberhasilan pembangunan manusia secara komprehensif dengan kualitas hidup masyarakat yang sangat baik dan berkelanjutan.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia dari tahun 2014 hingga 2023 menunjukkan dinamika yang signifikan, dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang meliputi aspek kesehatan, pendidikan, dan pendapatan, menjadi indikator utama dalam menilai kualitas hidup masyarakat serta tingkat kesejahteraan secara keseluruhan (Khairina dan Wijaya, 2023).



Sumber: Data Badan Pusat Statistik (BPS), diolah 2024.

### Gambar 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2014-2023

Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang konsisten dalam pencapaian IPM selama beberapa dekade terakhir. Berdasarkan data Badan Statistik (BPS), IPM Indonesia mengalami peningkatan dari 68,9 pada 2014 menjadi 74,39 pada tahun 2023. Meskipun demikian, capaian ini menempatkan Indonesia dalam kategori pembangunan manusia



menengah dan masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura (93,9), Brunei Darussalam (82,9), dan Malaysia (80,3).

Tantangan utama yang dihadapi Indonesia adalah kesenjangan IPM yang masih cukup besar antar provinsi, khususnya antara kawasan barat dan timur Indonesia. Kawasan Timur Indonesia (KTI) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 terdiri dari 17 provinsi, yaitu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua, umumnya memiliki capaian IPM yang lebih rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah timur Indonesia masih berada di bawah rata-rata nasional, mengindikasikan adanya ketimpangan yang harus segera ditangani (Chandra, 2022). Kesenjangan ini mencerminkan ketimpangan dalam akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi antara kawasan barat dan timur Indonesia. Provinsi-provinsi di KTI umumnya menghadapi tantangan geografis berupa wilayah kepulauan yang luas, kepadatan penduduk yang rendah, keterbatasan infrastruktur, serta akses yang sulit terhadap layanan publik.

Data menunjukkan bahwa sejak tahun 2014, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah barat sudah tercatat di angka 70, sementara di wilayah timur, terutama di Papua, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih



berada di angka 65 (BPS, 2024). Pada tahun 2023, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia bagian timur baru mencapai angka 70,66, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia bagian barat telah mencapai 74,58.

Pencapaian IPM dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi dalam sistem ekonomi dan sosial. Secara teoritis, faktor-faktor yang memengaruhi IPM dapat dikategorikan menjadi faktor ekonomi, faktor kebijakan pemerintah, dan faktor sosial-demografi. Faktor ekonomi meliputi tingkat pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas harga. Faktor kebijakan pemerintah mencakup alokasi anggaran untuk sektor sosial seperti pendidikan dan kesehatan, infrastruktur serta efektivitas implementasi program-program pembangunan manusia.

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan aktivitas dalam perekonomian yang mendorong bertambahnya produksi barang dan jasa di masyarakat, sehingga berkontribusi pada naiknya pendapatan serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. PDRB mencerminkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam suatu wilayah dalam periode tertentu.

Di Kawasan Timur Indonesia, hubungan antara PDRB per kapita dan IPM menunjukkan pola yang menarik untuk dikaji. Beberapa provinsi di KTI seperti Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan memiliki PDRB per kapita

tinggi karena didominasi oleh sektor pertambangan dan energi, namun IPM-nya tidak selalu sejalan dengan tingkat kemakmuran ekonomi



tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur ekonomi yang bergantung pada sektor ekstraktif tidak selalu memberikan dampak optimal terhadap pembangunan manusia. Sebaliknya, beberapa provinsi di KTI dengan PDRB per kapita yang relatif rendah namun memiliki distribusi pendapatan yang lebih merata menunjukkan capaian IPM yang lebih baik. Fenomena ini menunjukkan pentingnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan pemerataan manfaat pembangunan dalam meningkatkan IPM. Tantangan khusus di KTI adalah ketergantungan ekonomi pada sektor primer seperti pertambangan, perkebunan, dan perikanan yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Volatilitas PDRB per kapita akibat gejolak harga komoditas dapat memengaruhi stabilitas pencapaian IPM.

Selain itu, kemajuan suatu negara dapat diukur juga dari pendidikan serta tingkat harapan hidup masyarakatnya. Investasi pemerintah dalam sektor pendidikan dan kesehatan merupakan determinan langsung dari dua dimensi utama IPM. Di Kawasan Timur Indonesia, belanja pendidikan dan kesehatan pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis mengingat tantangan geografis dan keterbatasan akses yang dihadapi masyarakat. Kondisi geografis KTI yang terdiri dari ribuan pulau dengan kepadatan penduduk yang rendah membuat penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan memerlukan investasi yang lebih besar.

Pendidikan merupakan aset penting yang memungkinkan seseorang berkontribusi secara signifikan dalam mendukung kemajuan pembangunan. Akses yang adil terhadap pendidikan berkualitas dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Dengan memberikan kesempatan kepada semua dari berbagai latar belakang untuk memperoleh keterampilan dan



pengetahuan, pendidikan akan menciptakan peluang bagi semua orang untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Sementara itu, sebagai inti dari kesejahteraan, kesehatan berperan penting dalam mendukung produktivitas pembangunan manusia. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan fasilitas kesehatan dan jaminan kesehatan yang dirancang secara optimal melalui kebijakan pengeluaran yang tepat.

Berikut adalah data yang menunjukkan bahwa alokasi dana untuk sektor pendidikan dan kesehatan di Kawasan Timur Indonesia masih jauh berbeda jika dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia.



Sumber: Data DJPK Kemenkeu, diolah 2024.

**Gambar 1. 2** Belanja Pemerintah di Bidang Pendidikan di Indonesia



Sumber: Data DJPK Kemenkeu, diolah 2024.

**Gambar 1. 3** Belanja Pemerintah di Bidang Kesehatan di Indonesia



Data DJPK Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa kawasan barat, seperti Pulau Jawa dan Sumatera, menerima alokasi anggaran lebih besar dibandingkan kawasan timur, seperti Papua dan Nusa Tenggara, yang kemudian berdampak pada penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang masih tertinggal. Kawasan Barat Indonesia memiliki infrastruktur yang lebih berkembang, yang mempermudah akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan (Al-Mursyid, 2020). Sebaliknya, kawasan timur sering kali menghadapi kendala dalam hal transportasi dan aksesibilitas, yang menghalangi distribusi layanan publik dan aliran investasi (Aliu *et al.*, 2023). Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan dana yang memadai untuk pembangunan manusia melalui kebijakan pengeluaran yang terarah, baik di bidang pendidikan maupun kesehatan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi warganya dengan menyediakan pelayanan dasar guna memenuhi hak-hak penduduknya. Pelayanan dasar, termasuk layanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan, memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia (Mongan, 2019).

Faktor ekonomi lain yang juga dapat memengaruhi IPM, yaitu inflasi. Dampak inflasi terhadap IPM di Kawasan Timur Indonesia memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. Kondisi geografis KTI yang terdiri dari wilayah kepulauan dengan jarak yang jauh antar pulau menyebabkan biaya distribusi barang dan jasa menjadi lebih tinggi, sehingga tingkat inflasi di beberapa provinsi KTI cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Dampak inflasi terhadap IPM di KTI

tidak signifikan karena sebagian besar masyarakat masih bergantung pada ekonomi informal dengan tingkat pendapatan yang tidak tetap. Inflasi yang tinggi



dapat memaksa keluarga-keluarga di KTI untuk mengurangi alokasi pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan guna memenuhi kebutuhan konsumsi dasar. Fenomena anak putus sekolah untuk membantu ekonomi keluarga atau penundaan berobat karena mahalnya biaya kesehatan menjadi lebih umum terjadi ketika inflasi meningkat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai 'Analisis Faktor-Faktor yang memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2014-2023'.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah PDRB per kapita berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Timur Indonesia?
2. Apakah belanja pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Timur Indonesia?
3. Apakah belanja kesehatan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Timur Indonesia?
4. Apakah inflasi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Timur Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis bagaimana pengaruh PDRB per kapita terhadap pembentukan IPM di Kawasan Timur Indonesia.
2. Menganalisis bagaimana pengaruh belanja pemerintah di bidang pendidikan terhadap pembentukan IPM di Kawasan Timur Indonesia.



3. Menganalisis bagaimana pengaruh belanja pemerintah di bidang kesehatan terhadap pembentukan IPM di Kawasan Timur Indonesia.
4. Menganalisis bagaimana pengaruh Inflasi terhadap pembentukan IPM di Kawasan Timur Indonesia.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

1. Penelitian ini dapat memperkaya literatur dan pengetahuan dalam bidang ekonomi pembangunan, khususnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kawasan Timur Indonesia.
2. Penelitian ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa dan akademisi lain yang ingin mengembangkan studi serupa dengan fokus pada sektor atau wilayah berbeda.
3. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan penganggaran, khususnya terkait alokasi belanja pendidikan dan kesehatan agar lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia.
4. Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pengambil kebijakan dalam mengendalikan inflasi guna menjaga stabilitas ekonomi yang mendukung peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Landasan Teori

##### 2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 melalui laporan tahunan yang berjudul *Human Development Report*. Indeks ini dirancang sebagai indikator alternatif dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara, melampaui sekadar penilaian berdasarkan pendapatan nasional per kapita. Dengan kata lain, IPM bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kualitas hidup masyarakat, dengan mempertimbangkan faktor-faktor utama seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Keberadaan IPM memungkinkan perbandingan yang lebih objektif mengenai tingkat kesejahteraan antar wilayah dan menjadi dasar dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencerminkan kemajuan dalam kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Untuk mewujudkan SDM yang unggul, diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, investasi menjadi faktor kunci dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, terutama melalui sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya investasi yang dilanjutkan di kedua bidang tersebut, masyarakat dapat memperoleh akses lebih baik terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, yang pada



akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan daya saing daerah.

Pembangunan manusia mencakup tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, yang masing-masing dijabarkan ke dalam berbagai indikator spesifik. IPM dihitung dengan menggunakan skala indeks 0 hingga 100, di mana semakin tinggi angka IPM, semakin baik tingkat pembangunan manusia di suatu wilayah. Sejak tahun 2014 di Indonesia mengalami perubahan dalam perhitungan IPM (Indeks Pembangunan Manusia), namun secara umum metode perhitungan pembangunan manusia sama dengan yang digunakan UNDP, yaitu sebagai berikut.

#### 1. Indeks Pendidikan

Perhitungan Indeks pendidikan disusun berdasarkan dua indikator utama, yaitu Harapan Lama Sekolah (Expected Years of Schooling) dan Rata-rata Lama Sekolah (Mean Years of Schooling). Kedua indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat pencapaian pembangunan manusia dalam bidang pendidikan pada suatu wilayah.

Harapan Lama Sekolah (HLS) menggambarkan estimasi jumlah tahun pendidikan yang diharapkan dapat ditempuh oleh seorang anak berusia tujuh tahun ke atas pada masa mendatang, dengan asumsi bahwa pola partisipasi sekolah yang berlaku saat ini tidak mengalami perubahan. Penghitungan HLS dilakukan dengan cara membandingkan jumlah penduduk usia tujuh tahun ke atas yang masih bersekolah dengan total penduduk usia tujuh tahun ke atas secara keseluruhan. Rasio tersebut kemudian digunakan untuk



memperkirakan lamanya pendidikan yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak-anak di wilayah tertentu.

Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas, kemudian mengelompokkan mereka berdasarkan jenjang Pendidikan yang sedang atau telah ditempuh. Dengan demikian, RLS menggambarkan capaian aktual dari hasil pembangunan pendidikan di masa lalu.

Dalam perhitungan nilai kedua indikator tersebut, terdapat standar batas maksimum dan minimum yang telah ditetapkan oleh berbagai lembaga internasional. Untuk indikator Harapan Lama Sekolah, batas maksimum ditetapkan sebesar 18 tahun dan batas minimum 0 tahun. Sedangkan untuk Rata-rata Lama Sekolah, batas maksimum ditetapkan sebesar 15 tahun dan batas minimum 0 tahun.

## 2. Indeks Kesehatan

Angka harapan hidup saat lahir diperoleh dari rata-rata tingkat kelahiran dan kematian per tahun. Perbandingan kedua variabel ini diharapkan dapat mencerminkan estimasi rata-rata usia yang dapat dicapai oleh penduduk di suatu wilayah. Untuk mengukur dimensi kesehatan, terdapat standar nilai maksimum dan minimum yang telah disepakati secara global. Batas tertinggi dalam perhitungan indikator ini adalah 85 tahun, sedangkan batas terendahnya adalah 20 tahun. Standar ini telah ditetapkan dan diakui oleh United Nations Development Programme (UNDP).



### 3. Indeks Daya Beli

Kemampuan Kemampuan daya beli masyarakat, atau yang dikenal dengan istilah *Purchasing Power Parity* (PPP), merupakan salah satu indikator penting yang digunakan dalam menilai kondisi ekonomi suatu populasi dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks ini menggambarkan kemampuan individu dalam mengakses berbagai kebutuhan dasar dan menikmati hasil pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, dalam pengukuran daya beli penduduk, digunakan pendekatan pengeluaran per kapita riil yang telah disesuaikan, karena pendekatan ini dianggap lebih akurat dalam mencerminkan kondisi ekonomi riil masyarakat.

Dalam praktiknya, pengeluaran per kapita disesuaikan terhadap faktor harga dan inflasi agar nilai yang diperoleh benar-benar menggambarkan daya beli masyarakat secara riil. Penyesuaian ini dilakukan untuk menghindari distorsi akibat perbedaan tingkat harga antarwilayah maupun perubahan nilai mata uang dari waktu ke waktu. Setelah dilakukan penyesuaian terhadap nilai pengeluaran per kapita tahunan, langkah berikutnya adalah menghitung indeks pendapatan, yang berfungsi sebagai ukuran dari dimensi standar hidup layak (*decent standard of living*).

Indeks pendapatan ini menunjukkan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin tinggi nilai indeks pendapatan yang diperoleh, semakin besar pula daya beli per kapita penduduk di suatu wilayah. Peningkatan daya beli mencerminkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat



yang didorong oleh peningkatan pendapatan riil serta kestabilan harga barang dan jasa. Dengan demikian, kenaikan indeks daya beli dapat diartikan sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Mengacu pada ketiga indikator utama indeks pembangunan manusia, maka nilai Indeks Pembangunan Manusia dapat dihitung dengan menggunakan rumus (BPS,2014).

$$IPM = 1/3 \times (IPD + IHH + IP)$$

Keterangan:

IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

IPD (Indeks Pendidikan)

IHH (Indeks Harapan hidup)

IP (Indeks Pendapatan / Daya Beli)

Salah satu teori yang menjelaskan peran sumber daya manusia dalam pembangunan adalah *Human Capital Theory* yang dikemukakan oleh Gary S. Becker. Becker (1957) menekankan bahwa sumber daya manusia merupakan aset penting yang dapat ditingkatkan nilainya melalui investasi, seperti pendidikan, pelatihan, dan kesehatan. Becker berpendapat bahwa individu yang memiliki pendidikan dan keterampilan yang lebih baik akan memiliki produktivitas yang lebih tinggi, sehingga berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Investasi di bidang kesehatan juga



bidang penting karena kondisi fisik yang baik memungkinkan seseorang bekerja lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, pengeluaran pada sektor pendidikan dan kesehatan bukan sekadar biaya konsumsi, tetapi merupakan

bentuk investasi jangka panjang yang menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial.

Pada dasarnya, pembangunan manusia merupakan wujud dari cita-cita suatu bangsa dalam menciptakan perubahan struktural melalui langkah-langkah yang terencana dan sistematis. Tujuan utamanya adalah memperluas peluang dan pilihan hidup bagi setiap individu, yang hanya dapat tercapai jika mereka memiliki kesehatan yang baik, umur panjang, serta akses terhadap pendidikan dan keterampilan yang memadai. Selain itu, pemanfaatan potensi diri melalui kegiatan produktif juga menjadi aspek penting dalam pembangunan manusia. Semakin tinggi kapabilitas dasar suatu masyarakat, semakin besar pula kemungkinan suatu bangsa untuk meningkatkan daya saing dan mencapai kemajuan yang berkelanjutan.

### 2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah biasanya diukur melalui peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Peningkatan nilai PDRB mengindikasikan adanya ekspansi ekonomi yang terjadi akibat bertambahnya kegiatan produksi dan konsumsi di wilayah tersebut.

PDRB per kapita diperoleh dengan membagi nilai PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduknya pada periode yang sama. Indikator ini memberikan gambaran mengenai rata-rata pendapatan atau nilai ekonomi yang diciptakan per individu dalam suatu wilayah. Dengan demikian, PDRB per kapita sering digunakan sebagai proksi untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, karena menunjukkan kemampuan suatu

daerah dalam menghasilkan pendapatan bagi masyarakatnya (Todaro & H, 2011). Apabila peningkatan PDRB suatu daerah diiringi dengan



pertumbuhan PDRB per kapita yang tinggi, kondisi tersebut mencerminkan bahwa perekonomian wilayah tersebut tidak hanya berkembang secara agregat, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan penduduknya. Situasi ini menunjukkan bahwa semakin banyak lapangan pekerjaan yang tercipta, serta kualitas pekerjaan yang tersedia cenderung lebih baik, sehingga masyarakat memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Dalam konteks indikator standar hidup layak, besarnya pendapatan yang dimiliki penduduk akan memengaruhi pola konsumsi dan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Pendapatan yang meningkat memungkinkan rumah tangga mengalokasikan lebih banyak pengeluaran untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, gizi, serta kualitas tempat tinggal. Dengan kata lain, daya beli yang lebih besar memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya secara bertahap. Dampak ini pada akhirnya tercermin dalam peningkatan komponen IPM, khususnya dimensi standar hidup layak. Oleh karena itu, semakin tinggi pendapatan per kapita suatu daerah, semakin besar pula potensi peningkatan IPM, karena kesejahteraan masyarakat mengalami perbaikan seiring tingginya akses terhadap layanan sosial dan ekonomi (Fahmi & Dalimunthe, 2018).

Menurut Tarigan (2004), terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan dalam menghitung angka PDRB, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan Produksi, PDRB adalah total nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai pelaku usaha dalam suatu wilayah selama periode waktu tertentu, umumnya satu tahun.



2. Pendekatan Pendapatan, PDRB merupakan total imbalan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang terlibat dalam kegiatan produksi di suatu wilayah selama periode waktu tertentu, biasanya satu tahun.
3. Pendekatan Pengeluaran, PDRB mencakup seluruh komponen permintaan akhir, yang terdiri atas pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori dan ekspor neto.

Berdasarkan harga yang digunakan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku mencerminkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pasar pada tahun berjalan, sehingga sering digunakan untuk menggambarkan struktur dan besaran ekonomi suatu daerah pada periode tertentu. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun dasar tertentu sehingga pengaruh inflasi dapat dihilangkan. Oleh karena itu, PDRB atas dasar harga konstan lebih tepat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil suatu daerah dari waktu ke waktu.

### 2.1.3 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah keseluruhan alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mempercepat pembangunan ekonomi. Menurut Rostow dan Musgrave (1971), teori pengeluaran pemerintah memiliki kaitan erat dengan tahapan pembangunan ekonomi. Pada tahap awal pembangunan, rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional cenderung tinggi karena kebutuhan akan



infrastruktur sangat besar. Di tahap menengah, pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi agar mencapai tahap lepas landas dengan mengandalkan investasi, baik dari sektor pemerintah maupun swasta. Pada tahap ini, peran pemerintah menjadi sangat penting karena adanya berbagai kegagalan pasar dalam proses pembangunan. Selanjutnya, menurut Rostow, akan terjadi pergeseran fokus aktivitas pemerintah dari penyediaan infrastruktur ekonomi menuju pengeluaran yang lebih banyak diarahkan pada layanan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas sosial lainnya, dalam tahap lanjutan pembangunan ekonomi.

Dalam proses pembangunan, rasio investasi swasta terhadap Produk Nasional Bruto (GNP) cenderung meningkat, sedangkan rasio investasi pemerintah terhadap GNP justru menurun, sebagaimana dijelaskan oleh Musgrave. Sementara itu, Rostow menyatakan bahwa pada tahap lanjut pembangunan, peran pemerintah bergeser dari penyediaan infrastruktur ekonomi ke pengeluaran untuk layanan sosial, seperti program kesejahteraan hari tua, pendidikan, pelayanan kesehatan masyarakat, dan program sosial lainnya.

Menurut Suparmoko (2000), pengeluaran pemerintah memiliki empat klasifikasi utama. Pertama, pengeluaran pemerintah berperan sebagai investasi yang memperkuat ketahanan ekonomi di masa depan. Kedua, pengeluaran pemerintah dapat secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan dan fasilitas publik. Ketiga, pengeluaran pemerintah berfungsi sebagai upaya penghematan biaya di masa mendatang karena investasi yang dilakukan saat ini. Keempat, pengeluaran pemerintah mampu menciptakan lapangan kerja serta



memperluas distribusi daya beli masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan penerapan sistem anggaran berbasis kinerja, klasifikasi pengeluaran pemerintah disempurnakan menjadi dua kelompok utama, yaitu belanja aparatur dan belanja publik.

#### 1. Belanja Aparatur

Belanja aparatur adalah pengeluaran yang ditujukan untuk mendukung fungsi-fungsi pemerintahan dan operasional birokrasi. Jenis belanja ini mencakup pembayaran gaji dan tunjangan pegawai negeri, pembiayaan kegiatan administratif, pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan perkantoran, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan. Secara umum, belanja aparatur bersifat konsumtif karena lebih banyak diarahkan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun demikian, belanja aparatur tetap penting karena berperan dalam memastikan pelayanan publik dan pelaksanaan kebijakan pemerintah dapat berjalan dengan efektif.

#### 2. Belanja Publik

Belanja publik merupakan pengeluaran yang secara langsung memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Pengeluaran ini diarahkan untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta penyediaan jaminan sosial.



Belanja publik memiliki karakter produktif karena dapat menciptakan nilai tambah ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Adapun teori pengeluaran pemerintah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

#### 1. Pengeluaran Pemerintah Secara Mikro

Pengeluaran pemerintah pada tingkat mikro bertujuan untuk menyediakan barang publik yang tidak dapat disediakan oleh sektor swasta akibat adanya kegagalan pasar. Menurut Mangkosoebroto (2014), dalam perspektif mikroekonomi, teori perkembangan pemerintah berfokus pada analisis faktor-faktor yang mendorong permintaan terhadap barang publik serta faktor-faktor yang memengaruhi penyediaannya. Interaksi antara penawaran dan permintaan barang publik menentukan jumlah barang yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Pengeluaran pemerintah untuk barang publik juga dapat memicu peningkatan pengeluaran pada barang-barang lain. Perkembangan pengeluaran pemerintah dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain perubahan permintaan terhadap barang publik, perubahan aktivitas pemerintah dalam memproduksi barang publik beserta kombinasi faktor produksinya, perubahan kualitas barang publik, serta perubahan harga faktor-faktor produksi. Faktor-faktor tersebut menentukan besarnya alokasi anggaran yang dibutuhkan pemerintah dari waktu ke waktu.



## 2. Pengeluaran Pemerintah Secara Makro

Dari perspektif makroekonomi, pengeluaran pemerintah bertujuan untuk menganalisis ukuran sektor pemerintahan, termasuk transaksi anggaran, operasional perusahaan publik, dan kebijakan yang diterapkan. Pengeluaran pemerintah untuk sektor publik memiliki sifat elastis terhadap pertumbuhan ekonomi. Model pembangunan tentang pengeluaran pemerintah inilah yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave, yang menjelaskan hubungan antara perkembangan pengeluaran pemerintah dengan berbagai tahap dalam proses pembangunan ekonomi.

Menurut pandangan Keynes, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen dalam permintaan agregat. Pendapatan nasional dihitung menggunakan pendekatan pengeluaran dengan formula  $Y = C + I + G + X - M$ , yang dikenal sebagai identitas pendapatan nasional. Dalam rumus ini, Y mewakili pendapatan nasional sekaligus penawaran agregat, sedangkan variabel-variabel di sisi kanan mencerminkan permintaan agregat. Sementara itu, variabel G secara khusus merepresentasikan pengeluaran pemerintah.

### 2.1.4 Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan

Pendidikan memiliki peran krusial dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, karena menjadi fondasi utama dalam pengembangan sumber daya manusia yang strategis. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem

pendidikan Nasional yang mengatakan bahwa "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban



bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa”. Oleh karena itu, dunia pendidikan harus senantiasa memberikan layanan terbaik dengan meningkatkan kualitas serta jangkauan pendidikan. Selain itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C ayat (1), yaitu “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak untuk memperoleh pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, untuk meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia”. Adanya peningkatan kualitas pendidikan menjadi investasi fundamental dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing di dunia kerja. Alokasi anggaran yang disediakan pemerintah untuk sektor pendidikan merupakan bukti nyata komitmen dalam mengembangkan SDM guna mendorong produktivitas dan kemajuan masyarakat.

Anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan di Indonesia termasuk dalam kategori *mandatory spending*, yang berarti pengeluaran tersebut telah ditetapkan oleh undang-undang untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di berbagai daerah. Menurut Pasal 1 angka 40 UU No. 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012. Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui Kementerian Negara/Lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan

melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak masuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai



penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Adapun persentase anggaran pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan.

### 2.1.5 Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan

Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan memiliki peran yang sama pentingnya dengan pendidikan dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera. Sebagai pilar utama pembangunan, kesehatan memiliki makna yang sangat vital bagi kesejahteraan. Bersama dengan pendidikan, keduanya menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kapabilitas manusia, yang merupakan esensi dari pembangunan itu sendiri.

Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan merupakan upaya nyata dalam memenuhi hak dasar masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Selain itu, investasi di bidang ini juga berperan dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana pemerintah Indonesia menetapkan alokasi anggaran minimal sebesar 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di luar gaji, sedangkan besaran anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di luar gaji. Pembiayaan kesehatan oleh pemerintah bertujuan untuk memastikan ketersediaan dana yang berkelanjutan, memadai, serta distribusi secara adil dan efisien. Langkah ini dirancang guna mendukung



terselenggaranya pembangunan kesehatan yang optimal, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara maksimal sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan.

Tanggung jawab pemerintah daerah mencakup pemenuhan kebutuhan di sektor pendidikan, sosial, dan kesehatan. Untuk mendanai sektor-sektor publik tersebut, pemerintah daerah mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang dimilikinya. Dengan adanya otonomi daerah, kapasitas pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan semakin meningkat.

#### 2.1.6 Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum yang terjadi akibat ketidaksesuaian antara program penyediaan komoditas, seperti produksi, penetapan harga, maupun pencetakan uang, dengan tingkat pendapatan masyarakat (Salim, 2021). Inflasi tidak hanya mencerminkan naiknya harga satu atau dua komoditas, tetapi kenaikan harga secara menyeluruh yang berdampak pada turunnya daya beli masyarakat. Bank Indonesia mendefinisikan inflasi sebagai kecenderungan meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus yang diukur dengan indeks harga konsumen (IHK).

Secara umum, inflasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis:

1. Berdasarkan asalnya:

- a. *Demand-pull inflation*, inflasi jenis ini timbul karena meningkatnya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Kenaikan permintaan agregat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti



bertambahnya pengeluaran pemerintah yang dibiayai melalui pencetakan uang, meningkatnya permintaan ekspor, serta bertambahnya investasi swasta akibat tersedianya kredit dengan bunga rendah. Kondisi tersebut menyebabkan harga barang dan jasa naik secara umum karena permintaan yang lebih tinggi dibandingkan kapasitas produksi. Ketika daya beli masyarakat melampaui kemampuan produksi perekonomian, produsen biasanya menaikkan harga untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.

- b. *Cost-push inflation*, yaitu jenis inflasi yang muncul akibat meningkatnya biaya produksi dalam suatu perekonomian. Kondisi ini dapat terjadi, misalnya, ketika harga bahan bakar minyak (BBM) naik sehingga mendorong peningkatan biaya produksi. Fenomena ini umumnya terjadi pada masa pertumbuhan ekonomi yang pesat dan tingkat pengangguran rendah, di mana permintaan terhadap barang dan jasa tetap tinggi. Untuk menjaga kapasitas produksi, perusahaan cenderung menaikkan upah agar mampu mempertahankan maupun menarik tenaga kerja baru. Akibatnya, peningkatan biaya tersebut mendorong kenaikan harga secara umum dan berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara.
- c. *Imported inflation*, yaitu inflasi yang timbul akibat kenaikan harga barang impor yang masuk ke dalam negeri. Kenaikan ini dapat dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar mata uang domestik, meningkatnya harga komoditas global seperti minyak dan pangan, atau kebijakan perdagangan internasional. Fenomena ini terutama berdampak pada negara yang sangat bergantung pada impor barang



kebutuhan pokok maupun bahan baku industri, karena kenaikan harga barang impor akan meningkatkan biaya produksi di dalam negeri dan pada akhirnya mendorong harga barang serta jasa domestik naik secara umum.

2. Berdasarkan tingkatannya:

- a. Inflasi ringan (di bawah 10% per tahun). Inflasi pada level ini masih tergolong wajar dan tidak mengganggu kestabilan ekonomi. Bahkan, inflasi ringan dapat memberikan dorongan positif terhadap pertumbuhan karena mencerminkan adanya peningkatan permintaan barang dan jasa.
- b. Inflasi sedang (10–30% per tahun). Kondisi ini sudah mulai menekan daya beli masyarakat, khususnya pada kelompok berpendapatan rendah. Walaupun demikian, aktivitas perekonomian masih dapat berlangsung, meskipun dengan beban biaya hidup yang semakin tinggi
- c. Inflasi berat (30–100% per tahun). Pada kondisi ini, harga-harga naik tajam dan signifikan, sehingga kestabilan ekonomi terganggu. Inflasi berat dapat menimbulkan ketidakpastian, mengurangi investasi, serta memperparah beban masyarakat. Salah satu contoh nyata di Indonesia terjadi pada puncak krisis moneter tahun 1998, ketika inflasi mencapai 77,6% dan menyebabkan gejolak sosial-ekonomi yang luas.
- d. Hiperinflasi (lebih dari 100% per tahun). Pada kondisi ini, nilai mata uang jatuh drastis sehingga masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap uang, dan lebih memilih menyimpan kekayaannya dalam bentuk barang atau mata uang asing.



Dampak inflasi terhadap perekonomian bersifat ganda. Di satu sisi, inflasi yang terkendali dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena memberi sinyal adanya peningkatan permintaan barang dan jasa. Namun, inflasi yang tinggi justru menurunkan daya beli masyarakat, mengurangi tabungan, serta memperberat biaya pendidikan dan kesehatan. Hal ini berimplikasi pada penurunan kualitas hidup masyarakat yang tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). UNDP (2020) menekankan bahwa stabilitas harga merupakan prasyarat penting bagi pembangunan manusia, karena harga yang stabil menjaga akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar.

Secara umum, para ekonom berpendapat bahwa inflasi merupakan keadaan ketika harga barang dan jasa di masyarakat mengalami kenaikan. Berbagai teori telah dikemukakan oleh para ahli untuk menjelaskan fenomena ini, salah satunya adalah sebagai berikut:

1. Menurut John Maynard Keynes, inflasi terjadi ketika masyarakat berusaha meningkatkan standar hidup melebihi kapasitas ekonomi yang ada, sehingga permintaan agregat melampaui penawaran agregat dan menimbulkan celah inflasi. Kondisi ini muncul karena sebagian kelompok masyarakat mampu mengubah aspirasi mereka menjadi permintaan efektif, sementara pemerintah menambah peredaran uang, pengusaha meningkatkan investasi melalui kredit bank, dan pekerja menuntut kenaikan upah. Akibatnya, total permintaan melebihi jumlah barang yang tersedia, yang mendorong kenaikan harga secara umum. Peningkatan harga tersebut mencerminkan adanya sebagian rencana pembelian barang yang tidak dapat dipenuhi (Sukirno, 2012). Kondisi ini



dapat berdampak langsung terhadap pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kenaikan harga menyebabkan daya beli masyarakat menurun sehingga memengaruhi kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Dengan demikian, inflasi yang tidak terkendali berpotensi menghambat peningkatan kualitas hidup dan pembangunan manusia, sementara inflasi yang stabil justru dapat mendukung iklim ekonomi yang kondusif bagi peningkatan IPM.

2. Teori Harrod-Domar menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingkat tabungan dan investasi. Menurut teori ini, semakin tinggi tingkat tabungan dan investasi maka semakin besar kapasitas produksi suatu perekonomian. Namun, apabila peningkatan permintaan masyarakat yang didorong oleh investasi dan tabungan tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas produksi, maka akan muncul tekanan inflasi. Hal ini terjadi karena permintaan terhadap barang dan jasa meningkat lebih cepat dibandingkan ketersediaan output, sehingga mendorong kenaikan harga secara umum. Dengan kata lain, teori Harrod-Domar menegaskan bahwa ketidakseimbangan antara pertumbuhan permintaan agregat dan pertumbuhan kapasitas produksi menjadi salah satu penyebab terjadinya inflasi.

## **2.2. Hubungan antar Variabel**

### **2.2.1 Hubungan antara PDRB per Kapita dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Pertumbuhan ekonomi, yang biasanya diukur melalui peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan peningkatan



kapasitas produksi dan pendapatan masyarakat di suatu wilayah. Menurut Brata (2004), PDRB per kapita mencerminkan rata-rata pendapatan yang diperoleh oleh setiap penduduk dalam suatu wilayah, sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur awal untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi nilai PDRB per kapita suatu wilayah, maka semakin besar pula potensi penerimaan daerah tersebut. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan masyarakat yang mencerminkan kemampuan ekonomi yang lebih kuat. Dengan kata lain, PDRB per kapita yang tinggi menandakan tingkat kesejahteraan penduduk yang lebih baik serta menunjukkan bahwa wilayah tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Meningkatnya PDRB suatu wilayah biasanya diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan IPM. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari PDRB dapat memberikan sumber daya lebih banyak bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan, yang merupakan dua dimensi utama dalam penghitungan IPM.

### **2.2.2 Hubungan antara Belanja Pemerintah di Bidang Pendidikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Investasi pemerintah dalam pendidikan adalah pilar utama dalam mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM yang mencerminkan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, sangat dipengaruhi oleh seberapa besar perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan. Lebih dari sekadar meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan, belanja pemerintah yang masif di bidang ini memiliki efek domino yang positif terhadap kesehatan masyarakat dan taraf hidup secara umum.



Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan sebagai salah satu komponen utama pembangunan. Investasi di sektor ini berperan penting dalam mendorong kemajuan pendidikan, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah siswa yang berhasil menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat, semakin besar pula kemampuan individu usia produktif dalam memahami, mengadopsi, dan memanfaatkan perkembangan teknologi. Pendidikan adalah kunci untuk membuka peluang ekonomi yang lebih baik. Dengan keterampilan yang mumpuni, individu dapat meraih pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi, meningkatkan standar hidup mereka, dan memutus rantai kemiskinan yang seringkali mengikat dari generasi ke generasi.

Studi mengenai hubungan antara pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan hasil yang beragam, namun umumnya menggambarkan korelasi signifikan antara kedua variabel tersebut. Pengeluaran pemerintah dalam sektor pendidikan memiliki implikasi langsung terhadap kualitas pendidikan yang berdampak pada pengembangan sumber daya manusia. Penelitian oleh Mahulauw *et al.* (2016) memberikan bukti bahwa porsi belanja pemerintah yang lebih besar di bidang pendidikan dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pembangunan manusia. Hal ini juga didukung oleh penelitian dari Kahang *et al.* (2016), yang menunjukkan pengaruh positif pengeluaran pada sektor pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.



### 2.2.3 Hubungan antara Belanja Pemerintah di Bidang Kesehatan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Angka harapan hidup merupakan salah satu komponen utama dalam IPM yang mencerminkan tingkat kesehatan suatu populasi. Kesehatan adalah kebutuhan dasar yang menentukan produktivitas masyarakat dan kemajuan negara. Selain sebagai hak asasi dan bentuk keadilan, kesehatan juga berperan dalam meningkatkan kondisi sosial, memungkinkan masyarakat berkembang, serta keluar dari kemiskinan.

Penyediaan anggaran kesehatan memungkinkan adanya penyediaan fasilitas layanan kesehatan yang lebih baik, peningkatan jumlah tenaga medis, serta distribusi layanan kesehatan yang lebih merata. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 mengenai Anggaran Kesehatan yang menyebutkan bahwa anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5% dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari APBD di luar gaji. Anggaran yang tepat dalam sektor kesehatan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan angka harapan hidup dan kualitas kesehatan masyarakat (Kreuta *et. al*, 2020). Selain itu, kesehatan yang baik juga berdampak pada produktivitas masyarakat. Individu yang sehat memiliki kapasitas lebih besar untuk bekerja dan berkontribusi dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, belanja pemerintah di bidang kesehatan tidak hanya meningkatkan aspek kesehatan dalam IPM, tetapi juga berperan dalam meningkatkanjahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.



Salah satu penelitian yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dalam sektor kesehatan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan IPM yaitu, studi Pake *et al.* (2018) menunjukkan bahwa belanja pemerintah di bidang kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Kabupaten Halmahera Utara. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pengeluaran untuk kesehatan, dalam kombinasi dengan belanja pendidikan, sangat berpengaruh dalam mendorong kemajuan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, penelitian oleh Maulina *et al.* (2020) menemukan bahwa belanja pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh signifikan terhadap indikator kesehatan yang menjadi salah satu komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

#### **2.2.4 Hubungan antara Inflasi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Inflasi merupakan indikator makroekonomi yang menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam suatu periode tertentu. Pergerakan inflasi memiliki keterkaitan erat dengan daya beli masyarakat, yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat karena harga kebutuhan pokok meningkat, sehingga mengurangi kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti konsumsi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kondisi ini berimplikasi pada penurunan kualitas hidup dan menghambat peningkatan IPM. Sebaliknya, inflasi yang terkendali dalam batas wajar dapat menjaga stabilitas ekonomi

mendukung pembangunan manusia, karena masyarakat masih mampu mempertahankan konsumsi dasar mereka.



Sejalan dengan itu, penelitian Nurlina *et al.*, (2023) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Indonesia, terutama karena inflasi menurunkan kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, semakin tinggi inflasi, semakin besar pula tekanan yang dialami masyarakat, yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas pembangunan manusia.

### 2.3. Tinjauan Empiris

Hasan (2012), meneliti terkait pengaruh PDRB, kemiskinan dan belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2008–2014, menggunakan pendekatan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa PDRB memiliki pengaruh positif terhadap IPM dengan nilai koefisien sebesar 0,394952. Artinya, setiap kenaikan PDRB sebesar 1% akan meningkatkan IPM sebesar 0,39%. Selain itu, belanja modal juga memberikan pengaruh positif terhadap IPM dengan koefisien 0,207665, sementara tingkat kemiskinan memberikan dampak negatif terhadap IPM dengan koefisien sebesar -0,512399.

Mahulauw *et al.* (2016) meneliti pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku. Penelitian ini menggunakan metode analisis jalur (Path Analysis) dengan tingkat signifikansi 5%, di mana pendapatan per kapita digunakan sebagai variabel intervening. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan,



eluaran pemerintah di ketiga sektor tersebut berpengaruh positif terhadap IPM, dengan nilai R Square sebesar 68,1%, sementara % dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Namun, secara parsial,

pendapatan per kapita sebagai variabel intervening tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan IPM.

Kahang *et al.* (2016) meneliti pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kutai Timur dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan IPM, sedangkan pengeluaran di sektor kesehatan tidak memberikan dampak yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi anggaran di bidang kesehatan belum dioptimalkan secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia di daerah tersebut. Temuan ini menegaskan bahwa belanja pemerintah di sektor pendidikan memiliki peran yang lebih dominan dalam mendorong peningkatan IPM di Kabupaten Kutai Timur.

Pake *et al.* (2018) meneliti pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Halmahera Utara. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari instansi pemerintah dan dianalisis dengan metode regresi linear berganda menggunakan perangkat lunak SPSS versi 17. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan memiliki hubungan positif terhadap IPM, namun pengaruhnya tidak signifikan. Sebaliknya, pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Selain itu, secara simultan, pengeluaran pemerintah di kedua sektor tersebut memiliki hubungan positif dan pengaruh signifikan terhadap peningkatan IPM di Kabupaten Halmahera

a.



Desmiarti (2019) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel PDRB dan tingkat pengangguran terbuka terhadap IPM di Kabupaten Langkat dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan metode regresi linier berganda. Data yang digunakan bersifat sekunder berupa data runtut waktu selama sembilan tahun (2009–2017) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan. Secara simultan, kedua variabel tersebut bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap IPM, dengan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,967. Artinya, 96,7% variasi IPM di Kabupaten Langkat dapat dijelaskan oleh PDRB dan tingkat pengangguran terbuka, sementara sisanya 3,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Mongan (2019) menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dengan cakupan 32 provinsi selama periode 2000–2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pusat di sektor pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Sebaliknya, pengeluaran pemerintah pusat di sektor kesehatan serta pengeluaran pemerintah daerah di sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Sementara itu, pengeluaran pemerintah daerah di sektor kesehatan memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap IPM.



Maulina *et al.*, (2020) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh jeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan dan TPAK terhadap

IPM Di Indonesia dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan anggaran pendidikan tidak diikuti oleh efektivitas dan kualitas belanja yang optimal. Sebaliknya, pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, menunjukkan bahwa alokasi anggaran di bidang ini lebih efektif dalam meningkatkan pembangunan manusia. Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPM. Secara simultan, pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan serta tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlina *et al.*, (2023) mengenai Determinan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 1990–2021 menggunakan metode Autoregressive Distributed Lag (ARDL) menemukan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap IPM baik pada jangka panjang dan jangka pendek, yang artinya kenaikan inflasi akan menurunkan indeks pembangunan manusia. Hasil ini sesuai dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembangunan manusia baik pada jangka panjang dan jangka pendek (Koyuncu dan Yalcinkaya, 2022; Amate-Fortes et al., 2017; Indah dan Susanto, 2018).



## 2.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan landasan pemikiran yang melibatkan perpaduan antara teori, fakta, hasil observasi, dan kajian pustaka, yang berfungsi sebagai pijakan dalam penulisan karya ilmiah. Sebagai dasar, kerangka berpikir disusun untuk menjelaskan konsep - konsep yang terkait dengan penelitian. Kerangka berpikir menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, yaitu pengaruh PDRB per kapita, pengeluaran pemerintah di bidang Pendidikan, pengeluaran pemerintah di bidang Kesehatan, serta pengaruh inflasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Timur Indonesia.

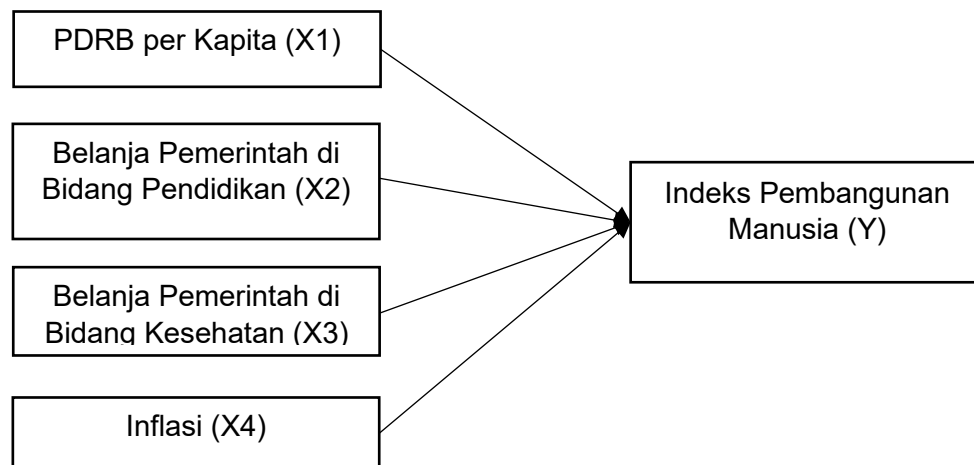
Selama ini konsep pembangunan yang cenderung berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur fisik belum cukup untuk mencapai kesejahteraan yang menyeluruh. Kesejahteraan memerlukan perhatian yang seimbang antara pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia. Oleh karena itu, pergeseran paradigma pembangunan menuntut keselarasan yang lebih erat antara kedua aspek tersebut.

Peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kawasan Timur Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu PDRB per kapita, belanja pemerintah di bidang pendidikan, belanja pemerintah di bidang kesehatan, dan inflasi. PDRB per kapita mencerminkan kapasitas ekonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja pendidikan diarahkan untuk meningkatkan literasi, angka partisipasi sekolah, serta kualitas sumber daya manusia. Belanja kesehatan berperan dalam memperluas akses dan kualitas pelayanan kesehatan, sehingga meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sementara itu, inflasi memengaruhi daya beli masyarakat, yang



merupakan salah satu komponen penting dalam standar hidup. Dengan demikian, keempat variabel tersebut memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan.

Dalam penelitian ini, hubungan antara variabel bebas, yakni PDRB per kapita ( $X_1$ ), belanja pendidikan ( $X_2$ ), belanja kesehatan ( $X_3$ ), dan inflasi ( $X_4$ ), dengan variabel terikat, yaitu Indeks Pembangunan Manusia ( $Y$ ), dituangkan dalam kerangka konseptual berikut.



**Gambar 2. 1** Kerangka Pemikiran

## 2.5. Hipotesis

Menurut Sugiyono (Agung & Yuesti, 2019), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dimana rumusan masalah disajikan dalam bentuk kalimat pernyataan. Disebut sementara karena jawaban yang diberikan masih didasarkan pada landasan teori dan belum diverifikasi melalui penelitian.

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka teori yang telah diuraikan, esis atau dugaan sementara dapat dirumuskan sebagai berikut.



1. Diduga PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Timur Indonesia.
2. Diduga belanja pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Timur Indonesia.
3. Diduga belanja pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Timur Indonesia.
4. Diduga inflasi berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Timur Indonesia.

